

Menavigasi Krisis COVID-19 dan Resesi Ekonomi: Diplomasi Manajemen Pertahanan Indonesia

Cecep Hidayat
Universitas Indonesia, Indonesia
cecep.hidayat@ui.ac.id

Suggested Citation:

Hidayat, Cecep. (2024). Menavigasi Krisis COVID-19 dan Resesi Ekonomi: Diplomasi Manajemen Pertahanan Indonesia. *Temali: Jurnal Pembangunan Sosial*, Volume 7, Nomor 2: -. <https://doi.org/10.15575/jt.v7i2.38688>.

Article's History:

Received July 2024; Revised August 2024; Accepted August 2024.
2024. journal.uinsgd.ac.id ©. All rights reserved.

Abstract:

This study aims to analyze how Indonesia's defense management can support diplomacy in addressing the challenges of the COVID-19 pandemic and economic recession. The research method used is qualitative, with data collected through literature reviews and analysis of official documents. The findings show that Indonesia's diplomacy plays a crucial role in handling the pandemic through vaccine diplomacy and economic recovery efforts. Indonesia actively participates in the fair development and distribution of vaccines and is committed to avoiding the politicization of vaccines. Moreover, the Indonesian government has implemented effective economic recovery policies, including increased government spending and the establishment of the COVID-19 Handling and National Economic Recovery Committee. This study contributes by identifying how defense management principles can be applied to diplomatic strategies and economic recovery policies while also highlighting the vital role of diplomacy in facing global crises.

Keywords: defense management, vaccine diplomacy, economic recovery, COVID-19, global diplomacy.

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana manajemen pertahanan Indonesia dapat menunjang diplomasi dalam menghadapi tantangan pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan analisis dokumen resmi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa diplomasi Indonesia memainkan peran penting dalam menangani pandemi melalui diplomasi vaksin dan upaya pemulihan ekonomi. Indonesia aktif dalam pengembangan dan distribusi vaksin yang adil, serta berkomitmen untuk menghindari politisasi vaksin. Selain itu, pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan pemulihan ekonomi yang efektif, termasuk peningkatan belanja pemerintah dan pembentukan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Studi ini memberikan kontribusi dengan mengidentifikasi bagaimana prinsip-prinsip manajemen pertahanan dapat diterapkan dalam strategi diplomasi dan kebijakan pemulihan ekonomi, serta menyoroti peran penting diplomasi dalam menghadapi krisis global.

Kata Kunci: manajemen pertahanan, diplomasi vaksin, pemulihan ekonomi, COVID-19, diplomasi global.

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 (*Coronavirus Disease 2019*) telah menimbulkan krisis yang signifikan di berbagai sektor, termasuk sosial, ekonomi, dan politik (Moore, 2020). Secara ekonomi, Indonesia mengalami penurunan tajam dengan pertumbuhan ekonomi minus 5,32% pada triwulan kedua 2020 (Saputro, 2020). Di tingkat sosial, pandemi ini memperburuk ketimpangan akses kesehatan dan memperluas dampak pada keamanan manusia (*human security*) (Newman, 2022). Sementara dari aspek politik, tantangan diplomasi global dalam menghadapi krisis kesehatan menjadi perhatian penting, terutama dalam menjalin kerja sama antarnegara. Pandemi ini memunculkan kebutuhan akan kolaborasi internasional yang lebih kuat untuk mengatasi dampaknya, baik dalam upaya kesehatan maupun pemulihan ekonomi (Balabantaray, 2022).

Dalam literatur terkait, isu COVID-19 sebagai ancaman *non-traditional security* telah menjadi fokus utama di berbagai studi sebelumnya, yang membahas implikasinya terhadap keamanan negara dan kerja sama global (Ariesta, 2020; Mawardin, 2020). Borio (2020) menekankan bahwa krisis COVID-19 unik karena dampaknya melampaui faktor ekonomi dan membutuhkan respons kebijakan yang lebih kompleks dan kolaboratif secara global. Shibata (2021) menyoroti dampak distribusional krisis ini terhadap sektor pekerjaan dan kelompok sosial yang rentan, terutama dalam konteks pandemi dibandingkan krisis keuangan global sebelumnya. Studi lain seperti Foroni et al. (2022) dan Li et al. (2022) lebih berfokus pada analisis makroekonomi, dengan kesimpulan bahwa pandemi membawa dampak yang lebih parah dibanding krisis keuangan global, terutama dalam hal pemulihan ekonomi.

Namun, kajian yang mengaitkan manajemen pertahanan dengan diplomasi dalam menghadapi pandemi dan resesi ekonomi masih jarang dilakukan. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada aspek kesehatan dan ekonomi, tanpa banyak mengelaborasi peran manajemen pertahanan dalam konteks diplomasi selama krisis. Ivan (2020) menegaskan pentingnya pengelolaan industri pertahanan di tengah krisis ekonomi yang dipicu oleh COVID-19, tetapi belum mengkaji secara mendalam hubungan antara diplomasi pertahanan dan penanganan pandemi. Studi ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menawarkan perspektif baru terkait integrasi antara diplomasi, manajemen pertahanan, dan penanganan pandemi, yang belum banyak dijelajahi dalam literatur sebelumnya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana manajemen pertahanan Indonesia dapat menunjang diplomasi dalam menghadapi tantangan pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Penelitian ini berupaya mengeksplorasi cara diplomasi dan manajemen pertahanan dapat berkolaborasi secara efektif dalam merespons krisis global ini, dengan fokus pada perlindungan warga negara dan kerja sama internasional.

Penelitian ini beragumen bahwa manajemen pertahanan yang adaptif dan fleksibel memiliki peran penting dalam diplomasi Indonesia untuk menghadapi ancaman pandemi dan resesi ekonomi. Dengan pendekatan yang terkoordinasi, Indonesia dapat memperkuat kapabilitas pertahanan dan diplomasi internasional untuk memitigasi dampak krisis, baik di bidang kesehatan maupun ekonomi.

METODE

Penelitian ini mengambil fokus pada konteks krisis COVID-19 yang berdampak pada diplomasi dan manajemen pertahanan negara terutama di Indonesia. Kasus pandemi COVID-19 dipilih karena krisis ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, kesehatan, dan keamanan. Penelitian berfokus pada kebijakan pertahanan dan diplomasi yang diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia dalam merespons dampak pandemi, dengan mempertimbangkan dinamika kerjasama internasional dan perlindungan warga negara.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data yang berasal dari hasil studi literatur (Lune & Berg, 2017). Data yang dikumpulkan mencakup berbagai penelitian dan publikasi yang relevan mengenai manajemen pertahanan, diplomasi, krisis COVID-19, serta resesi ekonomi. Studi literatur menjadi metode utama untuk mengidentifikasi konsep, teori, serta kebijakan yang telah diterapkan di berbagai negara, termasuk Indonesia, dalam menghadapi krisis pandemi ini.

Proses penelitian dimulai dengan pengumpulan data, termasuk artikel ilmiah, laporan pemerintah, serta dokumen kebijakan terkait manajemen pertahanan dan diplomasi selama pandemi. Data yang terkumpul dianalisis untuk memahami pola kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri berbagai database akademik dan situs web resmi lembaga pemerintahan serta organisasi internasional.

Teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 2013). Data yang diperoleh melalui studi literatur dianalisis dengan menggunakan teknik kualitatif untuk mengidentifikasi temuan utama terkait strategi pertahanan dan diplomasi. Reduksi data dilakukan untuk menyaring informasi yang paling relevan, sementara penyajian data membantu dalam mengorganisasikan temuan secara sistematis. Hasil dari analisis ini digunakan untuk menarik kesimpulan tentang bagaimana diplomasi dan manajemen pertahanan dapat berkolaborasi dalam merespons krisis pandemi COVID-19 di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

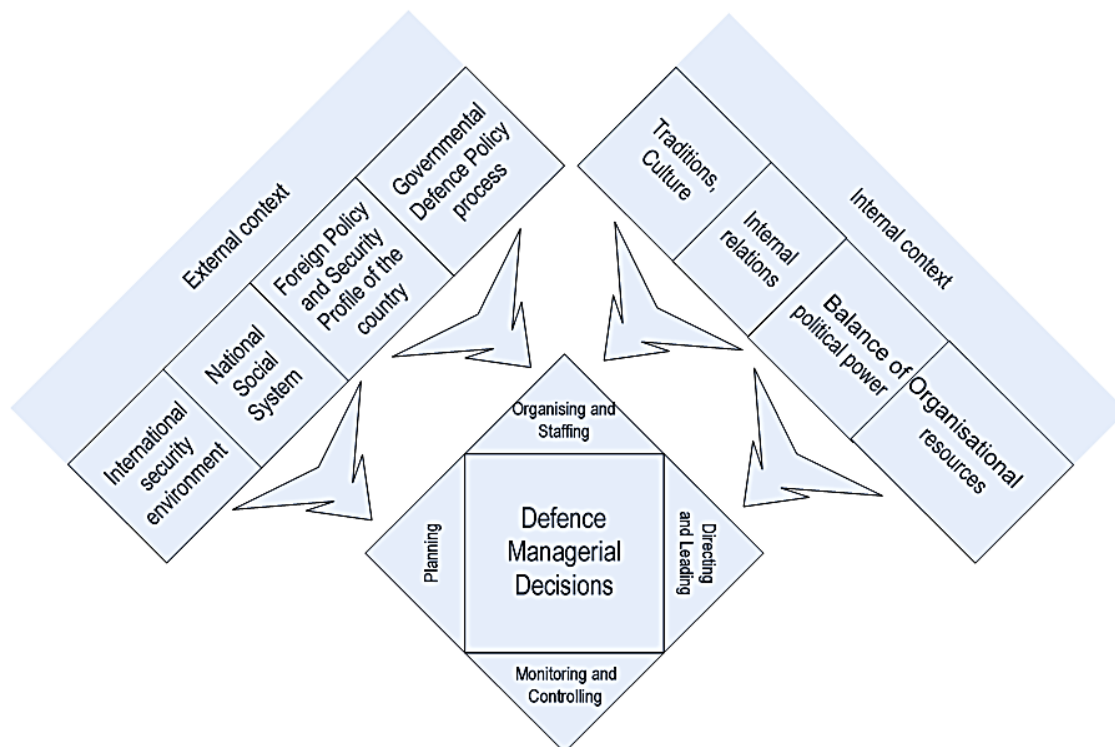
Manajemen Pertahanan dan Resesi Ekonomi

Menurut Supriyanto, manajemen pertahanan merupakan kebijakan yang mampu menuntun pemerintah dalam membangun kemampuan pertahanan negara untuk menjadi maju dan kuat. Kebijakan pertahanan memiliki

dampak strategis bagi *stakeholders* bidang pertahanan, baik sipil maupun militer. Dampak ini memiliki tiga cakupan berjangka panjang, berdampak luas, dan melibatkan banyak individu (Octavian, 2020).

Dalam bahasa berbeda, manajemen pertahanan adalah ilmu dan seni dalam merumuskan seperangkat kebijakan, strategi dan keputusan-keputusan fungsional organisasi pertahanan yang dihasilkan dari suatu proses manajemen oleh SDM pertahanan dan *stakeholders* untuk mempersiapkan segenap potensi dan kekuatan nasional agar menjadi kekuatan pertahanan.

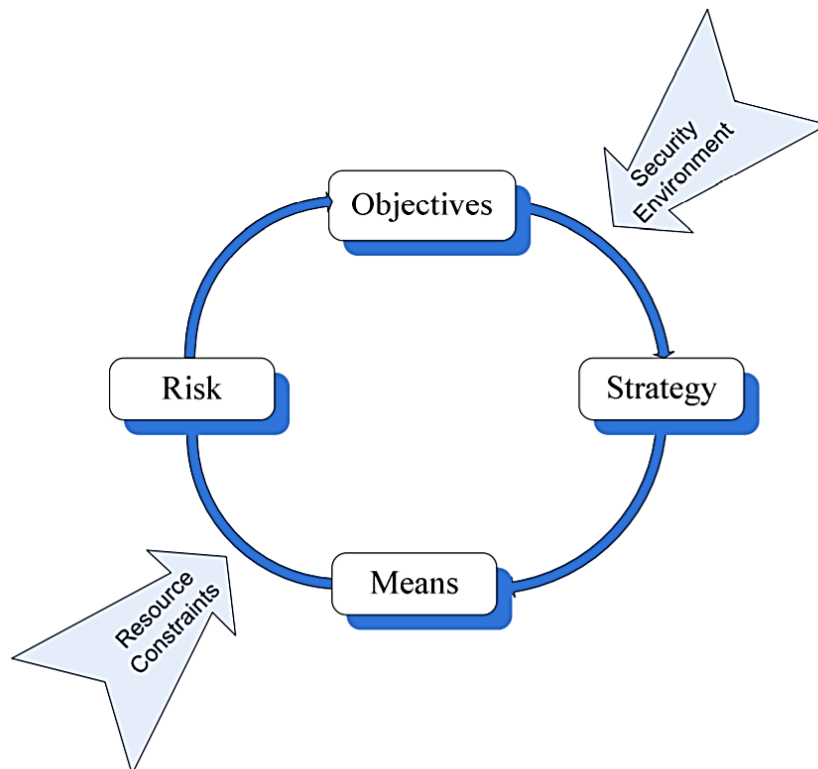
Gambar 1. Konteks Terpadu Manajemen Pertahanan



Sumber: Mahroza (2020).

Dalam gambar konteks terpadu manajemen pertahanan tersebut, secara sederhana memperlihatkan kontinum perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pertahanan menggambarkan integritas konteks eksternal dan internal lembaga pertahanan. Sedangkan perencanaan pertahanan merupakan proses inti dalam manajemen pertahanan. Hal ini dapat divisualkan dari gambar berikut (Mahroza, 2020).

Gambar 2. Perencanaan Pertahanan sebagai Proses Inti dalam Manajemen Pertahanan



Sumber: Mahroza (2020).

Dalam sistem manajemen pertahanan yang matang, perencanaan dapat dibagi menjadi tiga cakrawala yang berbeda, yaitu perencanaan jangka panjang, menengah, dan pendek, dengan masing-masing memiliki prosesnya sendiri. Pertama, perencanaan jangka panjang dilakukan dengan menganalisis tren evolusi lingkungan keamanan. Para perencana mempertimbangkan berbagai ancaman dan tantangan yang mungkin dihadapi di masa depan, serta peran aliansi dan kebijakan yang berlaku. Mereka juga meninjau strategi keamanan dan pertahanan yang diadopsi, dengan tujuan menciptakan kerangka kerja untuk menanggapi perkembangan strategis dalam jangka panjang.

Kedua, perencanaan jangka menengah, yang sering disebut sebagai program, dilakukan setiap tahun. Perencanaan ini bertujuan untuk menjembatani strategi jangka panjang dengan kebutuhan dan implementasi jangka pendek. Program ini memungkinkan pengembangan kekuatan angkatan bersenjata diarahkan menuju model yang sesuai untuk menghadapi tantangan di masa depan, dengan tetap memperhatikan perencanaan dan implementasi yang akan terjadi dalam jangka menengah.

Ketiga, perencanaan jangka pendek berfokus pada rincian implementasi dalam satu atau dua tahun pertama dari rencana jangka menengah. Rencana ini mencakup komponen spesifik seperti rekrutmen, pendidikan, pelatihan, pengadaan, serta konstruksi, termasuk anggaran yang diperlukan untuk masing-masing komponen tersebut. Karena itu, perencanaan jangka pendek disusun secara ketat sesuai dengan batasan perkiraan anggaran yang tersedia, memastikan setiap komponen dapat direalisasikan secara efektif.

Selanjutnya, sebuah negara dapat dikategorikan telah masuk ke dalam resesi ekonomi jika telah mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi secara berturut-turut. Indikator yang dapat dijadikan indikator untuk mengetahui sebuah negara masuk dalam resesi ekonomi antara lain adalah jumlah angka produksi yang tidak seimbang dengan konsumsi masyarakat. Jika produksi suatu negara sangat tinggi namun konsumsi masyarakat yang rendah, maka akan terjadi penumpukan persediaan barang. Sebaliknya, jika tingkat konsumsi masyarakat yang terlalu tinggi, sementara produksi sangat rendah, maka pemerintah harus melakukan impor secara besar-besaran. Pada akhirnya juga akan mengganggu pertumbuhan ekonomi.

Indikator selanjutnya dapat diambil dari laporan pertumbuhan ekonomi suatu negara selama dua kuartal berturut-turut. Jika pada kuartal pertama mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi, dan kemudian berlarut

pada kuartal kedua, maka dapat disimpulkan negara tersebut sedang mengalami permasalahan ekonomi, dan statusnya masuk dalam resesi ekonomi (Rudiansyah, 2020).

Resesi ekonomi tidak sama dengan krisis ekonomi. Resesi berarti pertumbuhan ekonomi berada dalam nilai minus atau merosot, sedangkan krisis adalah kondisi sebuah negara yang mengalami kemerosotan ekonomi secara drastis. Dampak dari krisis ekonomi adalah pondasi dasar ekonomi yang dimiliki suatu negara terlalu rapuh. Yang terjadi kemudian adalah kondisi laju inflasi di pasar yang sangat tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang macet. Resesi ekonomi yang terus berkepanjangan akan menciptakan depresi ekonomi. Pada titik ini, artinya sebuah negara sudah cukup lama berada dalam pertumbuhan ekonomi yang minus dan tidak juga menunjukkan perbaikan.

Dalam menghadapi resesi ekonomi seperti yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, manajemen pertahanan dapat menjadi salah satu strategi penting yang diterapkan oleh pemerintah untuk menstabilkan kondisi ekonomi negara. Manajemen pertahanan tidak hanya berkaitan dengan aspek militer semata, tetapi juga mencakup pendekatan yang lebih luas terhadap pengelolaan sumber daya nasional secara efektif dan efisien (Ploom et al., 2024). Pendekatan ini melibatkan integrasi berbagai sektor, termasuk sektor ekonomi, dalam upaya mempertahankan stabilitas nasional (Ball & Leitenberg, 2021). Dalam hal ini, manajemen pertahanan berperan dalam menjaga ketahanan nasional melalui alokasi sumber daya yang tepat, penguatan industri pertahanan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, yang secara tidak langsung turut berkontribusi pada pemulihan ekonomi.

Sebagai contoh, dalam situasi pandemi, sektor industri pertahanan dapat diadaptasi untuk mendukung upaya produksi barang-barang vital seperti alat kesehatan, ventilator, dan obat-obatan yang sangat dibutuhkan untuk penanganan krisis kesehatan. Selain itu, dengan mengoptimalkan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang terfokus pada bidang pertahanan dan keamanan, negara dapat memperkuat basis tenaga kerja yang tangguh dalam menghadapi tantangan ekonomi (Kurnia et al., 2023). Perencanaan jangka pendek dan menengah dalam manajemen pertahanan juga berperan dalam merespons kebutuhan segera untuk mengatasi dampak resesi, seperti pengadaan alat-alat medis dan pengelolaan anggaran negara yang lebih fleksibel.

Lebih jauh lagi, kebijakan manajemen pertahanan dapat mendukung diplomasi ekonomi dengan memperkuat kerja sama internasional dalam bidang keamanan dan pertahanan (Rios et al., 2020). Melalui diplomasi pertahanan yang kuat, negara dapat menjalin aliansi strategis yang tidak hanya membantu meningkatkan keamanan nasional, tetapi juga membuka peluang perdagangan dan kerja sama ekonomi, yang pada akhirnya dapat mempercepat pemulihan ekonomi dari dampak resesi. Dengan demikian, manajemen pertahanan tidak hanya menjaga keamanan fisik negara, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen penting dalam stabilisasi dan pemulihan ekonomi di tengah krisis global seperti pandemi COVID-19.

Diplomasi Vaksin dan Pemulihan Ekonomi Indonesia di Masa Pandemi

Diplomasi mempunyai peran yang penting dan signifikan dalam segala masa, termasuk seperti saat ini, pandemi COVID-19. Diplomasi menjadi saluran komunikasi dengan negara lain dalam membina kepercayaan negara lain dan membangun identitas keindonesiaan di tengah panggung global, termasuk saat pandemi ini (Berridge, 2022). Indonesia sudah memainkan peranan dan kontribusi yang cukup signifikan dalam membantu menyelesaikan pandemi di dunia. Hal ini, bukan hanya menguntungkan banyak pihak, tetapi juga menguntungkan Indonesia dan mengangkat citra dan reputasi Indonesia di panggung global.

Indonesia juga mempunyai peran sebagai Ketua DK-PBB (Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa) pada Agustus 2020 (Humas Setkab RI, 2020). Indonesia mengusung agenda perdamaian berkelanjutan pascapandemi di dunia ini. Tidak ada satu negara pun yang mampu menghadapi pandemi ini sendiri, meskipun mereka adalah *super power* atau tidak, tetapi semuanya harus bekerja sama.

Dalam menghadapi COVID-19, Indonesia pernah mendukung dua resolusi, yaitu resolusi Majelis Umum PBB berjudul "*Global Solidarity to Fight COVID-19*", pada 2 April 2020 dan resolusi tentang COVID-19 kepada WHA (*World Health Assembly*) pada Mei 2020 (Nurhadi et al., 2023). Keduanya dilakukan, meskipun Indonesia masih pada level menyerukan semata (Mardiah et al., 2021).

Dalam konteks akses global, target utama diplomasi Indonesia di dalam ranah internasional adalah vaksin. Vaksin adalah solusi paling efektif dan efisien untuk menghentikan pandemi COVID-19. Diplomasi yang digaribawahi oleh Indonesia diarahkan agar pengembangan vaksin *coronavirus* dapat tepat sasaran, sehingga distribusi dapat merata dan berkeadilan. Selain itu, Indonesia juga memperjuangkan harga vaksin yang relatif

terjangkau oleh semua negara, termasuk negara miskin sehingga, vaksin tidak hanya diprioritaskan kepada negara yang memiliki dana besar untuk membelinya.

Oleh karena itu, Indonesia menjadi salah satu negara di Asia Tenggara yang dipertimbangkan dalam pengembangan vaksin COVID-19. Indonesia telah menunjukkan kepada dunia, terutama di kawasan Asia Tenggara, sebagai negara yang menciptakan vaksin COVID-19. Indonesia telah membuktikan diri bukan hanya sebagai pasar vaksin asing, tetapi juga dapat memproduksi dan bekerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan penangkal virus *corona* tersebut. Indonesia juga sudah membuktikan kepada dunia bahwa tidak skeptis dan pesimistis dalam menghadapi pandemi COVID-19 (Kemkes RI, 2020).

Indonesia telah aktif dalam diplomasi vaksin COVID-19 dengan fokus pada pengembangan vaksin secara kolaboratif dan distribusi yang adil. Pemerintah menekankan pentingnya menciptakan mekanisme distribusi vaksin yang merata untuk mengurangi risiko penyebaran virus (Kemlu RI, 2024). Diplomasi vaksin yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri ini termasuk mendorong transfer pengetahuan dari produsen vaksin ke negara-negara yang tidak memproduksi vaksin, serta kerja sama internasional dalam pengembangan dan produksi vaksin. Selain itu, Indonesia berkomitmen untuk menghindari politisasi vaksin (Kemlu RI, 2022).

Dalam menghadapi penurunan pertumbuhan ekonomi akibat pandemi, pemerintah Indonesia menerapkan berbagai strategi untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Langkah awal yang diambil adalah meningkatkan belanja pemerintah guna merangsang pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga atau keempat (Roziqin et al., 2021). Pemerintah juga membentuk Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan pemulihan. Fokus utama pemerintah adalah pada sektor kesehatan untuk menekan penyebaran COVID-19 dan mempercepat pemulihan pasien, yang diharapkan dapat menghidupkan kembali perekonomian. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah mengalokasikan anggaran besar di bank umum dan Bank Pembangunan Daerah (BPD), yang dapat digunakan sebagai stimulus jika Indonesia menghadapi resesi (Sholahuddin et al., 2021).

Kebijakan-kebijakan ini terbukti efektif dalam menghindari resesi ekonomi. Menurut penelitian Rusmini et al. (2023) dalam "Bangkitnya Perekonomian Indonesia Pasca COVID-19," perekonomian Indonesia, meskipun mengalami penurunan signifikan selama pandemi, menunjukkan pemulihan yang positif setelah penerapan kebijakan pemulihan. Sebelumnya, sebelum pandemi, IHSG Indonesia berada pada angka sekitar 6300, namun turun menjadi di bawah 4000 selama pandemi. Penurunan ini menyoroti dampak berat pandemi terhadap ekonomi Indonesia.

Laporan Bank Indonesia dan IMF (2022) menunjukkan bahwa Indonesia berhasil menjaga stabilitas ekonomi dan sektor keuangan selama pandemi. IMF menilai bahwa Indonesia mengimplementasikan kebijakan makroekonomi yang kuat, termasuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), kebijakan moneter yang akomodatif, dan upaya untuk mendorong kredit. Laporan Article IV Consultation tahun 2021 oleh IMF menegaskan pencapaian ini dan menyambut baik langkah-langkah yang diambil Indonesia. Selain itu, Kajian Purwanti (2024) mengungkapkan bahwa Indonesia berhasil keluar dari bayang-bayang pandemi COVID-19, menunjukkan keberhasilan dalam mengatasi tantangan ekonomi dan kesehatan yang ditimbulkan oleh krisis global ini.

Tantangan Diplomasi ASEAN dalam Menghadapi Pandemi COVID-19

Sekurang-kurangnya terdapat dua tantangan besar pandemi COVID-19 bagi ASEAN. *Pertama* adalah aspek *human security* (keamanan manusia) berupa ancaman keselamatan dan kesehatan penduduknya. *Worldometers* memperkirakan kawasan ini pada tahun 2020 dihuni sekitar 668.619.840 jiwa. Ancaman ini nyata melihat tidak ada satu pun negara anggota ASEAN yang imun dari paparan *coronavirus* ini. Semua memberitakan kasus infeksi virus tersebut di wilayah masing-masing. *Kedua*, aspek *national security* (keamanan nasional) karena pandemi memukul banyak sektor kehidupan, khususnya ekonomi. Dampaknya, ancaman resesi ekonomi menjadi kenyataan dan upaya persiapan pemulihan pascapandemi menjadi keharusan. Kemerosotan produk domestik bruto atau pertumbuhan ekonomi riil negatif selama dua kuartal ini sangat mengancam.

Menurut De Carles (2016), proses komunikasi merupakan elemen fundamental dalam diplomasi. Kebutuhan akan komunikasi yang efektif menjadi semakin jelas, terutama ketika kendala komunikasi muncul, yang mendorong pencarian solusi alternatif. Di era pandemi, kemunculan diplomasi virtual menjadi salah satu solusi untuk mengatasi tantangan komunikasi global. Hal ini membawa perubahan dalam rutinitas diplomasi untuk menyesuaikan diri dengan situasi baru.

Dalam konteks kesehatan, diplomasi Indonesia di ASEAN mencakup usulan tentang prosedur protokol pelacakan dan investigasi bersama terkait penyebaran virus corona. Usulan ini berfokus pada pencegahan

penyebaran virus lintas batas dan mencerminkan upaya Indonesia untuk memberikan fasilitas kesehatan dan bantuan kepada warganya yang terdampak COVID-19. Selain itu, Indonesia juga aktif dalam KTT ASEAN yang berlangsung secara virtual pada 14 April dan dipimpin oleh Perdana Menteri Vietnam, Nguyen Xuan Phuc (Purwanto, 2020). KTT tersebut menegaskan komitmen bersama untuk mengendalikan penyebaran COVID-19.

Negara-negara ASEAN telah berkoordinasi melalui AHA Centre (Pusat Koordinasi Bantuan Kemanusiaan untuk Penanggulangan Bencana) untuk menangani bencana, termasuk pandemi COVID-19. Idealnya, AHA Centre seharusnya memiliki mandat lebih luas untuk menangani krisis kesehatan global sebagai bencana non-alam (Mawardin, 2020). AHA Centre berperan penting dalam merespons pandemi dengan kapasitas SDM, fasilitas, jaringan, dan kemitraan strategis yang ada. Peran AHA Centre dapat dioptimalkan untuk supervisi, memobilisasi sumber daya medis, dan mendistribusikan bantuan logistik ke negara-negara anggota ASEAN.

Dalam kerangka kebijakan regional ASEAN, peningkatan fasilitas kesehatan dan bantuan khusus bagi tenaga medis harus menjadi prioritas. Dukungan yang memadai berupa peralatan, pelatihan personil, dan insentif khusus sangat penting agar tenaga medis dapat memberikan pelayanan yang optimal, termasuk kerjasama dengan WHO (World Health Organization).

Di bidang ekonomi, Indonesia telah menjalankan langkah diplomasi penting di ASEAN dengan mencapai beberapa kesepakatan untuk mengatasi dampak krisis COVID-19. *Pertama*, disepakati relokasi anggaran kerja sama organisasi sebesar 10 persen untuk menangani situasi darurat penyebaran COVID-19 di ASEAN. *Kedua*, para menteri ekonomi ditugaskan untuk mempersiapkan program ekonomi pascapandemi dan memastikan kelancaran konektivitas rantai pasokan untuk perdagangan, termasuk dengan mitra global. *Ketiga*, paket kebijakan fiskal dan stimulus moneter diimplementasikan untuk mendukung sektor-sektor yang terdampak pandemi.

Di tengah kondisi pandemi, Indonesia memperkuat diplomasi ekonominya untuk menarik investasi asing. Salah satu langkah strategis adalah memanfaatkan platform digital, seperti yang tercermin dalam program *Road to Indonesia Investment Day 2020* (Daniel, 2020). Pandemi menjadi momentum bagi Indonesia untuk menarik investor asing, terutama yang berencana merelokasi pabrik-pabrik dari Tiongkok. Hingga saat ini, tujuh perusahaan asing telah berinvestasi di Indonesia, dan 17 perusahaan lainnya berencana merelokasi pabrik dengan total investasi mencapai US\$ 37 miliar.

Saputro (2020) mengidentifikasi tiga aspek utama dalam kerja sama internasional di bidang ekonomi yang relevan dengan konteks pandemi. *Pertama*, dukungan keuangan. Pandemi COVID-19 menambah tekanan pada anggaran nasional di banyak negara, termasuk Indonesia, yang harus mengatasi defisit anggaran yang melebar melebihi batas defisit tiga persen. Penurunan pendapatan negara akibat berkurangnya aktivitas ekonomi juga memerlukan dukungan finansial dari bantuan bilateral, meskipun bantuan utang luar negeri memiliki risiko yang harus dikelola dengan hati-hati.

Kedua, bantuan teknis. Penanganan pemulihan ekonomi memerlukan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik domestik maupun internasional. Indonesia perlu memanfaatkan pengalaman negara lain dalam program pemulihan untuk merancang kebijakan yang efektif. Berbagi informasi dan pengalaman dengan negara lain dapat membantu Indonesia mengembangkan strategi pemulihan ekonomi yang tepat.

Ketiga, diplomasi ekonomi. Selama pemulihan ekonomi, penting untuk mempromosikan kepentingan ekonomi Indonesia kepada mitra internasional, terutama dalam bidang keuangan, perdagangan, investasi, dan pariwisata. Kesadaran global mengenai ketergantungan pada mitra dagang tertentu selama krisis, seperti gangguan rantai pasokan, menggarisbawahi pentingnya diversifikasi hubungan ekonomi. Misi diplomatik Indonesia memainkan peran penting dalam membangun citra positif internasional dan meningkatkan kredibilitas Indonesia sebagai mitra dagang yang potensial (Saputro, 2020).

Menavigasi Krisis COVID-19: Penerapan Manajemen Pertahanan

Pandemi COVID-19 telah menghadirkan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam menghadapi krisis ini, pendekatan manajemen pertahanan memberikan kerangka yang berguna untuk mengevaluasi strategi dan kebijakan yang diterapkan untuk mengatasi dampak pandemi. Menggunakan prinsip-prinsip manajemen pertahanan, kita dapat menganalisis bagaimana Indonesia menavigasi krisis ini melalui berbagai strategi yang telah diterapkan.

Pertama, perencanaan jangka panjang dalam konteks pandemi.

Dalam konteks perencanaan jangka panjang, Indonesia menunjukkan adaptasi strategi untuk menghadapi dampak pandemi secara global. Menurut Supriyanto dalam (Octavian, 2020), manajemen pertahanan berfokus pada kebijakan yang membangun kemampuan pertahanan negara dalam jangka panjang. Dalam hal ini, Indonesia

mengusung agenda perdamaian berkelanjutan dan mendukung resolusi global seperti “*Global Solidarity to Fight COVID-19*” dan resolusi WHA tentang COVID-19. Strategi ini mencerminkan upaya untuk membangun kerangka kerja global yang kuat dalam mengatasi krisis kesehatan, menekankan pentingnya kerja sama internasional untuk mengatasi tantangan jangka panjang. Perencanaan jangka panjang Indonesia terlihat dalam usahanya untuk memastikan distribusi vaksin yang merata dan harga vaksin yang terjangkau, yang bertujuan untuk mencegah ketidakadilan dalam akses vaksin di seluruh dunia.

Kedua, perencanaan jangka menengah untuk pemulihan ekonomi.

Perencanaan jangka menengah dalam manajemen pertahanan melibatkan pengembangan program yang menjembatani strategi jangka panjang dengan implementasi jangka pendek. Di Indonesia, langkah-langkah pemulihan ekonomi diimplementasikan melalui kebijakan yang terkoordinasi dengan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Sholahuddin et al., 2021). Fokus pemerintah pada sektor kesehatan untuk mengendalikan penyebaran virus dan mempercepat pemulihan pasien merupakan contoh perencanaan jangka menengah. Selain itu, alokasi anggaran di bank umum dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk merangsang ekonomi lokal merupakan upaya strategis yang menunjukkan bagaimana kebijakan jangka menengah diterapkan untuk mengatasi dampak ekonomi pandemi.

Ketiga, perencanaan jangka pendek dalam tanggapan pandemi.

Perencanaan jangka pendek berfokus pada implementasi rinci dari strategi yang telah dirumuskan. Dalam konteks pandemi COVID-19, Indonesia menerapkan kebijakan seperti peningkatan belanja pemerintah dan stimulus ekonomi untuk merespons penurunan pertumbuhan ekonomi dengan cepat. Laporan dari Bank Indonesia dan IMF menunjukkan bahwa kebijakan makroekonomi yang akomodatif dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah membantu menjaga stabilitas ekonomi dan sektor keuangan selama pandemi (Haryono, 2022). Dalam konteks ini, manajemen pertahanan menyediakan kerangka untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan anggaran dan target yang ditetapkan.

Keempat, tantangan dan diplomasi asean dalam menghadapi pandemi.

Diplomasi Indonesia dalam kerangka ASEAN juga mencerminkan penerapan prinsip manajemen pertahanan. Upaya Indonesia untuk meningkatkan fasilitas kesehatan, memprioritaskan bantuan medis, dan memanfaatkan diplomasi virtual menunjukkan pendekatan strategis dalam menghadapi tantangan keamanan manusia dan nasional di kawasan. Penekanan pada koordinasi melalui AHA Centre dan kesepakatan untuk menangani dampak krisis COVID-19 menggambarkan bagaimana perencanaan dan strategi yang efektif dapat mengatasi tantangan regional. Di bidang ekonomi, diplomasi untuk menarik investasi asing dan relokasi pabrik dari Tiongkok menunjukkan upaya Indonesia dalam memanfaatkan momentum pandemi untuk memulihkan ekonomi dan memperkuat hubungan internasional.

Oleh karenanya, penerapan manajemen pertahanan dalam konteks krisis COVID-19 di Indonesia menunjukkan bagaimana kebijakan dan strategi dapat diterapkan dalam perencanaan jangka panjang, menengah, dan pendek untuk menghadapi tantangan yang kompleks dan dinamis. Penggunaan prinsip-prinsip ini membantu Indonesia untuk menavigasi krisis secara efektif dan memperkuat posisinya di panggung global.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa diplomasi Indonesia memainkan peran penting dalam merespons pandemi COVID-19 dengan dua pendekatan utama: diplomasi vaksin dan pemulihan ekonomi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Indonesia aktif dalam pengembangan dan distribusi vaksin secara adil serta berkomitmen untuk menghindari politisasi vaksin, yang mencerminkan upaya diplomasi global Indonesia. Selain itu, pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan pemulihan ekonomi yang efektif, termasuk peningkatan belanja pemerintah dan pembentukan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Penelitian ini memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana Indonesia, dalam konteks diplomasi dan manajemen pertahanan, menghadapi tantangan multidimensional yang timbul dari pandemi. Penekanan pada pengelolaan sumber daya untuk menangani krisis kesehatan dan ekonomi secara bersamaan mencerminkan pergeseran penting dalam diplomasi, dari pendekatan tradisional ke diplomasi virtual.

Penelitian ini memberikan nilai lebih melalui penerapan prinsip manajemen pertahanan untuk menganalisis respons Indonesia terhadap pandemi. Metode ini memungkinkan evaluasi yang lebih terstruktur dari strategi jangka panjang, menengah, dan pendek yang diterapkan selama krisis. Konsep diplomasi virtual dan kolaborasi regional melalui AHA Centre juga merupakan kontribusi signifikan, menunjukkan bagaimana ASEAN dan anggotanya dapat beradaptasi dengan perubahan kondisi global dan memanfaatkan teknologi untuk mengatasi krisis. Dengan

memfokuskan pada pengelolaan krisis yang terpadu dan menyeluruh, penelitian ini menawarkan pendekatan baru dalam menganalisis respons krisis global, berbeda dari metode yang sering kali lebih sektoral atau terpisah.

Namun, studi ini memiliki keterbatasan terutama pada cakupan yang terbatas pada beberapa negara anggota ASEAN dan kemungkinan adanya variasi dalam pengalaman dan respons di tingkat negara. Penelitian ini juga mengandalkan data yang tidak sepenuhnya mencakup dampak jangka panjang dari pandemi. Arah penelitian selanjutnya sebaiknya melibatkan studi yang lebih mendalam tentang dampak spesifik di setiap negara anggota ASEAN, serta analisis jangka panjang untuk menilai efektivitas kebijakan pemulihan. Penelitian juga dapat mengeksplorasi bagaimana diplomasi virtual dan kolaborasi regional dapat dioptimalkan untuk menghadapi krisis serupa di masa depan, serta menilai adaptasi strategi manajemen pertahanan dalam konteks perubahan global yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariesta, M. (2020). Investasi Hingga Diplomasi Vaksin, Cara Perwakilan RI Cegah Resesi Ekonomi. *Medcom.Id*. <https://www.medcom.id/>
- Balabantaray, S. R. (2022). Coronavirus Pandemic and Construction of False Narratives: Politics of Health (Hate) and Religious Hatred/Hate Crimes in India. *Sociología y Tecnociencia: Revista Digital de Sociología Del Sistema Tecnocientífico*, 12(2), 307–322.
- Ball, N., & Leitenberg, M. (2021). *The structure of the defense industry: An international survey*. Routledge.
- Berridge, G. R. (2022). *Diplomacy: theory and practice*. Springer Nature.
- Borio, C. (2020). The Covid-19 economic crisis: Dangerously unique. *Business Economics (Cleveland, Ohio)*, 55(4), 181.
- Daniel, G. R. (2020). Diplomasi Ekonomi RI pada Momentum Pandemi. *Media Indonesia*. <https://mediaindonesia.com/>
- De Carles, N. R. (2016). *Early modern diplomacy, theatre and soft power: The making of peace*. Springer.
- Froni, C., Marcellino, M., & Stevanovic, D. (2022). Forecasting the Covid-19 recession and recovery: Lessons from the financial crisis. *International Journal of Forecasting*, 38(2), 596–612.
- Haryono, E. (2022). IMF: Indonesia Berhasil Menjaga Stabilitas Perekonomian di Tengah Pandemi. *Departemen Komunikasi Bank Indonesia*. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_248722.aspx
- Humas Setkab RI. (2020). Selesai Agustus 2020, Ini Capaian Indonesia Sebagai Presidensi Dewan Keamanan PBB. *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*. <https://setkab.go.id/selesai-agustus-2020-ini-capaian-indonesia-sebagai-presidensi-dewan-keamanan-pbb/>
- Ivan, L. (2020). Management of Covid-19 Crisis at the Level of Defence Industry. *International Conference Innovative Business Management & Global Entrepreneurship (IBMAGE 2020)*, 270–293.
- Kemkes RI. (2020). Vaksin Corona Buat Indonesia Siap Edar Tahun 2022. *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*. <https://p2ptm.kemkes.go.id/informasi-p2ptm/vaksin-corona-buatan-indonesia-siap-edar-tahun-2022>
- Kemlu RI. (2022). Diplomasi Vaksin Indonesia dalam Percepatan Vaksinasi Global. *Kementerian Luar Negeri RI*. <https://kemlu.go.id/maputo/id/news/18947/diplomasi-vaksin-indonesia-dalam-percepatan-vaksinasi-global>
- Kemlu RI. (2024). Diplomasi Kesehatan Indonesia Berhasil Amankan Lebih Dari 500 juta Dosis Vaksin COVID-19. *Kementerian Luar Negeri RI*. <https://kemlu.go.id/portal/id/read/5666/berita/diplomasi-kesehatan-indonesia-berhasil-amankan-lebih-dari-500-juta-dosis-vaksin-covid-19>
- Kurnia, R. R., Saputro, G. E., & Murtiana, S. (2023). Management of human resources in national defense depend on defense economics point of view. *International Journal on Social Science, Economics and Art*, 13(1), 1–11.
- Li, Z., Farmanesh, P., Kirikkaleli, D., & Itani, R. (2022). A comparative analysis of COVID-19 and global financial crises: evidence from US economy. *Economic Research-Ekonomika Istraživanja*, 35(1), 2427–2441.
- Lune, H., & Berg, B. L. (2017). *Qualitative research methods for the social sciences*. Pearson.
- Mahroza, J. (2020). *Ontologi III: Manajemen Pertahanan Sebagai Bidang Ilmu Pembangunan Kekuatan Pertahanan*. Universitas Pertahanan Indonesia.
- Mardiah, A. N. R., Ramadhanti, R., Irmawandari, & Syahbandi, M. (2021). Fighting the Impact of the Global Pandemic: A Media Analysis of Local Community Responses and Solidarity Actions in Indonesia. In *Post-Disaster Governance in Southeast Asia: Response, Recovery, and Resilient Societies* (pp. 271–290).

Springer.

- Mawardin. (2020). Diplomasi Indonesia dan Kerjasama ASEAN Melawan Corona. *Akurat.Co*. <https://akurat.co/>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2013). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Sage Publications, Inc.
- Moore, R. C. (2020). Older Adults, Social Technologies, and the Coronavirus Pandemic: Challenges, Strengths, and Strategies for Support. *Social Media and Society*, 6(3). <https://doi.org/10.1177/2056305120948162>
- Newman, E. (2022). COVID-19: A human security analysis. *Global Society*, 36(4), 431–454.
- Nurhadi, N., Yuda, T. K., Kafaa, K. A., & Pratiyudha, P. P. (2023). Changing welfare solidarity: social policy and solidarity ventures during COVID-19 outbreak in Indonesia. *Journal of Asian Public Policy*, 1–21.
- Octavian, A. (2020, November). *Epistemologi II: Manajemen dalam Ilmu Pertahanan*.
- Ploom, I., Kalvet, T., Kütt, R., Veinla, M., & Tiits, M. (2024). Managing risks in public procurement of defense innovation: lessons from the development of an anti-armor mine in Estonia. *Journal of Baltic Studies*, 1–25.
- Purwanti, A. (2024). Indonesia Berhasil Keluar dari Bayang-bayang Pandemi Covid-19. *Kompas.Id*. <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/05/08/indonesia-berhasil-keluar-dari-bayang-bayang-pandemi-covid-19>
- Purwanto, A. (2020). Strategi ASEAN Merespons Dampak Covid-19. *Kompas.Id*. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/strategi-asean-merespons-dampak-covid-19>
- Rios, E., Rego, A., Iturbe, E., Higuero, M., & Larrucea, X. (2020). Continuous quantitative risk management in smart grids using attack defense trees. *Sensors*, 20(16), 4404.
- Roziqin, A., Mas' udi, S. Y. F., & Sihidi, I. T. (2021). An analysis of Indonesian government policies against COVID-19. *Public Administration and Policy*, 24(1), 92–107.
- Rudiansyah, B. (2020). Indonesia dalam Bayang-bayang Resesi Ekonomi, Ini Strategi Pemerintah. *Ruang Negeri.Com*. <http://ruangnegeri.com/>
- Rusmini, M. E., Cahyono, D. N., Putri, K., Afkarina, I., Aprilia, P., Taufiq, A., Lestari, D. P., Silvia, K. J., & Firmanda, B. A. (2023). Bangkitnya Perekonomian Indonesia Pasca Covid-19. *JURNAL EKONOMI BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN*, 12(1), 59–75.
- Saputro, E. N. M. (2020). Bagaimana kerja sama antarnegara bisa membantu Indonesia dalam memulihkan ekonomi saat pandemi. *The Conversation.Com*. <https://theconversation.com>
- Shibata, I. (2021). The distributional impact of recessions: The global financial crisis and the COVID-19 pandemic recession. *Journal of Economics and Business*, 115, 105971.
- Sholahuddin, M., Manullang, S. O., & Sari, D. (2021). Understanding review of economic loss due to government policy respond to the COVID-19 disruption in Indonesia. *Journal of Business, Economics & Management*, 4(1), 180–188.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).